

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pengelolaan dana desa merupakan salah satu instrumen utama dalam mendukung pembangunan di tingkat desa di seluruh Indonesia, termasuk di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dengan adanya dana desa, diharapkan pembangunan desa dapat dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengelolaan dana desa sering menghadapi tantangan, seperti kendala administratif, akuntabilitas, dan efektivitas implementasi, yang dapat mempengaruhi hasil akhir dari program-program pembangunan yang dilaksanakan.

Secara astronomis Kecamatan Percut Sei Tuan terletak diantara  $3^{\circ}54''$  -  $3^{\circ}83''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}72''$  -  $98^{\circ}86''$  Bujur Timur. Luas wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan 190,52 Km<sup>2</sup>. Kecamatan Percut Sei Tuan berbatasan dengan Selat Malaka di sebelah utara dan Kecamatan Batang Kuis serta Pantai Labu di sebelah selatan, yang semuanya merupakan hasil dari letak fisiknya; di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Labuhan Deli dan Kota Medan; dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kota Medan. Keberadaan batas-batas geografis ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya dan dana desa harus mempertimbangkan perbedaan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di setiap desa, yang akan mempengaruhi alokasi dan penggunaan dana desa. Herman (2023:3). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai

karakteristik masing-masing desa sangat penting untuk merumuskan strategi pengelolaan dana desa yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

**Tabel 1.1**  
**Luas Wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Percut Sei Tuan**

| No.                                        | Nama Desa         | Luas Total Area<br>(km <sup>2</sup> /s.q.km) | Persentase terhadap Luas<br>Kecamatan |
|--------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1                                          | Amplas            | 3,10                                         | 1,62                                  |
| 2                                          | Kenangan          | 1,27                                         | 0,67                                  |
| 3                                          | Tembung           | 5,35                                         | 2,80                                  |
| 4                                          | Sumber Rejo Timur | 4,16                                         | 2,18                                  |
| 5                                          | Sei Rotan         | 5,16                                         | 2,70                                  |
| 6                                          | Bandar Klippa     | 18,48                                        | 9,69                                  |
| 7                                          | Bandar Khalipah   | 7,25                                         | 3,80                                  |
| 8                                          | Medan Estate      | 6,90                                         | 3,62                                  |
| 9                                          | Laut Dendang      | 1,70                                         | 0,89                                  |
| 10                                         | Sampali           | 23,93                                        | 12,54                                 |
| 11                                         | Bandar Setia      | 3,50                                         | 1,83                                  |
| 12                                         | Kolam             | 5,98                                         | 3,13                                  |
| 13                                         | Saentis           | 24,00                                        | 12,58                                 |
| 14                                         | Cinta Rakyat      | 1,48                                         | 0,78                                  |
| 15                                         | Cinta Damai       | 11,78                                        | 6,16                                  |
| 16                                         | Pematang Lalang   | 20,10                                        | 10,53                                 |
| 17                                         | Percut            | 10,63                                        | 5,57                                  |
| 18                                         | Tanjung Rejo      | 19,00                                        | 9,96                                  |
| 19                                         | Tanjung Selamat   | 16,33                                        | 8,56                                  |
| 20                                         | Kenangan Baru     | 0,72                                         | 0,38                                  |
| <b>Total Luas Area<br/>Percut Sei Tuan</b> |                   | <b>190,52</b>                                | <b>100,00</b>                         |

Sumber: BPS Kabupaten Deli Serdang, 2023.

Kecamatan Percut Sei Tuan terdiri dari 18 desa dan 2 kelurahan dengan total luas wilayah 190,52 km<sup>2</sup>. Berdasarkan data BPS Kabupaten Deli Serdang tahun 2023, desa dengan luas terbesar adalah desa Saentis, yang mencakup 24,00 km<sup>2</sup> atau 12,58% dari luas kecamatan. Sementara itu, desa dengan luas terkecil adalah desa Cinta Rakyat dengan luas 1,48 km<sup>2</sup> atau 0,78%. Beberapa desa lainnya, seperti Sampali dan Pematang Lalang, juga memiliki wilayah yang signifikan, masing-masing sebesar 12,54% dan 10,53% dari total luas kecamatan.

Selain 18 desa tersebut, kecamatan Percut Sei Tuan memiliki 2 kelurahan, yaitu kelurahan Kenangan dan kelurahan Kenangan Baru. Berbeda dengan desa yang mengelola anggaran desa secara mandiri, kelurahan tidak mengelola anggaran desa secara mandiri karena anggarannya berasal langsung dari pemerintah daerah, bukan dari alokasi dana desa (ADD) yang disalurkan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, penelitian ini hanya fokus pada desa-desa yang menerima dan mengelola dana desa, sedangkan kelurahan tidak termasuk dalam objek penelitian.

Variasi luas antar desa ini mencerminkan adanya perbedaan kebutuhan pengelolaan, baik dari segi alokasi anggaran maupun tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Desa-desa yang lebih luas, seperti Saentis dan Sampali, cenderung memerlukan strategi pengelolaan yang lebih kompleks, terutama dalam hal penyediaan infrastruktur, distribusi layanan publik, dan partisipasi masyarakat yang lebih luas. Sementara itu, desa-desa yang lebih kecil, seperti Cinta Rakyat, menghadapi tantangan yang berbeda, seperti keterbatasan sumber daya dan anggaran yang lebih kecil, yang memerlukan pengelolaan yang efisien dan terarah.

Perbedaan karakteristik ini berimplikasi pada variasi strategi yang perlu diterapkan dalam pengelolaan dana desa. Desa yang lebih luas dan lebih padat penduduknya mungkin memerlukan pendekatan berbasis teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana, serta melibatkan masyarakat secara lebih aktif dalam proses perencanaan dan pengawasan. Sebaliknya, desa dengan wilayah yang lebih kecil mungkin fokus

pada optimalisasi sumber daya yang ada, seperti memaksimalkan penggunaan anggaran untuk kebutuhan prioritas.

Pemahaman mendalam mengenai karakteristik setiap desa sangat penting untuk merumuskan strategi pengelolaan dana desa yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Setiap desa memerlukan pendekatan pengelolaan yang berbeda, berdasarkan pada luas wilayah, tingkat kepadatan penduduk, dan kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karena itu, strategi pengelolaan dana desa yang efektif harus mempertimbangkan faktor-faktor ini, sehingga alokasi dana dapat digunakan secara optimal dan berkontribusi terhadap pembangunan desa yang lebih merata dan berdaya guna.

**Tabel 1.2**  
**Data Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Percut Sei Tuan**

| No | Kecamatan            | Alokasi Dana TA 2022<br>(Rp) | Realisasi TA<br>2022<br>(Rp) | Alokasi Dana TA 2021<br>(Rp) |
|----|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1  | Kec. Bangun Purba    | 17.233.447.000               | 17.233.447.000               | 17.019.290.000               |
| 2  | Kec. Batang Kuis     | 10.070.450.000               | 10.070.450.000               | 8.854.608.000                |
| 3  | Kec. Beringin        | 9.792.811.000                | 9.792.811.000                | 8.783.923.000                |
| 4  | Kec. Biru-Biru       | 12.616.395.000               | 12.616.395.000               | 13.545.658.000               |
| 5  | Kec. Deli Tua        | 3.190.275.000                | 3.190.275.000                | 2.692.430.000                |
| 6  | Kec. Galang          | 22.085.800.000               | 22.085.800.000               | 22.613.620.000               |
| 7  | Kec. Gunung<br>Merah | 7.394.875.000                | 7.394.875.000                | 8.220.963.000                |
| 8  | Kec. Hamparan Perak  | 23.696.881.000               | 23.696.881.000               | 22.172.752.000               |
| 9  | Kec. Kotalimbaru     | 12.297.271.000               | 12.297.271.000               | 12.041.639.000               |
| 10 | Kec. Labuhan Deli    | 7.116.674.000                | 7.116.674.000                | 6.738.461.000                |
| 11 | Kec. Lubuk<br>Pakam  | 5.468.638.000                | 5.468.638.000                | 4.955.525.000                |
| 12 | Kec. Namorambe       | 24.701.111.000               | 24.701.111.000               | 25.455.173.000               |
| 13 | Kec. Pagar Merbau    | 12.883.125.000               | 12.883.125.000               | 12.292.507.000               |
| 14 | Kec. Pancur Batu     | 20.674.006.000               | 20.674.006.000               | 19.116.155.000               |
| 15 | Kec. Pantai Labu     | 16.498.116.000               | 16.498.116.000               | 16.093.192.000               |
| 16 | Kec. Patumbak        | 7.935.600.000                | 7.935.600.000                | 7.216.504.000                |

|               |                        |                        |                        |                        |
|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 17            | Kec. Percut Sei Tuan   | 21.177.746.000         | 21.177.746.000         | 18.940.168.000         |
| 18            | Kec. Sibolangit        | 20.356.173.000         | 20.356.173.000         | 21.500.862.800         |
| 19            | Kec. STM. Hilir        | 12.266.827.000         | 12.266.827.000         | 12.335.757.000         |
| 20            | Kec. STM. Hulu         | 15.176.094.000         | 15.176.094.000         | 15.561.765.000         |
| 21            | Kec. Sunggal           | 17.948.844.000         | 17.948.844.000         | 15.235.183.000         |
| 22            | Kec. Tanjung<br>Morawa | 23.376.966.000         | 23.281.245.000         | 20.638.145.040         |
| <b>JUMLAH</b> |                        | <b>323.958.125.000</b> | <b>323.862.404.000</b> | <b>312.024.280.840</b> |

Sumber: Pemkab Kabupaten Deli Serdang, 2022.

Berdasarkan data alokasi dan realisasi dana desa tahun 2022 di Kecamatan Percut Sei Tuan, terlihat bahwa dana yang dialokasikan sebesar Rp 21.177.746.000 telah direalisasikan sepenuhnya sesuai dengan rencana. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran di kecamatan ini berjalan dengan baik dan transparan. Dibandingkan dengan tahun 2021, terjadi peningkatan alokasi dana dari Rp 18.490.746.000 menjadi Rp 21.177.746.000, yang mencerminkan adanya kebutuhan tambahan dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini.

Peningkatan alokasi dana ini juga menunjukkan adanya fokus yang lebih besar terhadap pengembangan infrastruktur dan layanan publik di Kecamatan Percut Sei Tuan. Namun, untuk memastikan bahwa peningkatan ini benar-benar efektif, diperlukan pemantauan lebih lanjut terkait bagaimana dana ini digunakan dan dampaknya terhadap masyarakat. Penting juga untuk memperkuat transparansi dan keterlibatan masyarakat agar penggunaan dana desa bisa lebih optimal dan berkelanjutan.

Meskipun dana desa bertujuan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, permasalahan dalam pengelolaannya masih sering terjadi. Salah satu contoh nyata adalah kasus

penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) di Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan. Dalam kasus ini, mantan Sekretaris Desa, Rusmiati, dan mantan Kepala Desa, Faisal Arifin, terlibat dalam pengelolaan dana CSR yang diterima dari PT. KPPN. Selama periode Januari 2017 hingga Desember 2020, dana sebesar Rp 15 juta per bulan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik tidak dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014.

Total dana yang diterima mencapai Rp 720 juta, namun hanya Rp 147.672.000 yang dapat dipertanggungjawabkan. Sisanya digunakan untuk pengeluaran fiktif, seperti pembiayaan beasiswa dan perawatan mobil ambulans yang tidak dapat dibuktikan. Temuan audit dari Inspektorat Kabupaten Deli Serdang menunjukkan bahwa kerugian negara akibat penyalahgunaan ini mencapai Rp 540.457.000.

Kasus ini menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Pelanggaran terhadap ketentuan administrasi keuangan desa dan penyalahgunaan dana publik mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran desa. Hal ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menciptakan kepercayaan publik yang rendah terhadap pengelola dana desa. Dengan demikian, agar dana desa benar-benar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, harus ada dorongan yang lebih kuat untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya. Toga Pasaribu, (25 Januari 2024).

Kasus dugaan penyalahgunaan dana desa juga ditemukan di Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, yang menyoroti tantangan serius dalam akuntabilitas pengelolaan anggaran publik. Lembaga Swadaya Masyarakat Terima Keluhan Dan Aspirasi Masyarakat Sumatera (LSM-TERKAMS) melaporkan adanya indikasi korupsi dalam pengelolaan Dana Desa (DD) untuk tahun 2021 hingga 2023. Salah satu temuan utama adalah dugaan penyediaan ambulans fiktif senilai Rp 200 juta, yang mencerminkan pelanggaran prinsip transparansi dan tanggung jawab dalam penggunaan dana publik.

Lebih lanjut, LSM-TERKAMS mengungkapkan bahwa sekitar Rp 400 juta dari dana desa digunakan oleh perangkat desa dan pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi. Penyalahgunaan ini mengakibatkan ketidakberhasilan dalam pembangunan sarana dan prasarana yang seharusnya didanai oleh dana desa. Situasi ini berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, karena dana yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan justru tidak digunakan sesuai peruntukannya.

Oleh karena itu, sangat penting untuk menekankan perlunya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam proses pengawasan agar penggunaan anggaran dapat berlangsung transparan dan akuntabel. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap langkah pengelolaan dana desa, kita dapat memperkuat kontrol sosial dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Langkah-langkah ini sangat diperlukan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan dan memastikan bahwa dana desa benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Redaksi Terkam News (12 Februari 2024).

Kasus serupa juga ditemukan di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan yaitu dugaan penyalahgunaan dana desa, yang menunjukkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana desa sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Berdasarkan laporan dari Media Sinar Pagi Group, jumlah total dana desa yang diterima selama tahun 2022-2023 mencapai sekitar Rp 2,1 miliar. Namun, terdapat dugaan bahwa kepala desa telah merekayasa laporan penggunaan dana tersebut, termasuk melakukan praktik markup dan pengadaan proyek fiktif. Situasi ini menyoroti perlunya penerapan sistem transparansi digital yang lebih efektif, agar masyarakat umum dapat dengan mudah mengakses catatan yang merinci bagaimana uang desa dibelanjakan.. Transparansi digital berfungsi untuk memberdayakan masyarakat dalam proses pengawasan, memungkinkan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam menilai dan memantau penggunaan dana desa. Dengan demikian, penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa bukan hanya sebuah keharusan, tetapi juga hak asasi yang mendukung partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Media sinar pagi group (09 Juli 2024).

Selain itu, ditemukan kasus terbaru yang terjadi di Desa Cinta Rakyat pada Juli 2024 mengungkap adanya dugaan penyalahgunaan Dana Desa oleh Kepala Desa, di mana anggaran digunakan untuk proyek-proyek yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proyek seperti pembangunan drainase dan pagar besi di lapangan sepak bola dinilai tidak tepat sasaran dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi serta orang-orang terdekat kepala desa. Warga merasa

dirugikan karena proyek tersebut tidak memberikan manfaat nyata, terutama dalam menghadapi masalah infrastruktur yang mendesak, seperti banjir akibat drainase yang rusak. Tindakan ini diduga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur bahwa kepala desa harus mengutamakan pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dugaan pengalihan dana program Ketahanan Pangan (Ketapang) menunjukkan adanya indikasi kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana publik. Situasi ini memperlihatkan pentingnya pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa untuk memastikan bahwa setiap anggaran digunakan sesuai dengan kepentingan masyarakat luas. Redaksi (05 Juli 2024).

Berdasarkan permasalahan yang telah ditemukan, bahwa transparansi digital, partisipasi masyarakat, dan keamanan data menjadi tiga aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan dana desa. Transparansi digital memungkinkan informasi terkait penggunaan dana desa dapat diakses oleh masyarakat secara mudah dan jelas. Partisipasi masyarakat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan dan evaluasi penggunaan dana desa, sementara keamanan data memastikan bahwa informasi dan dana yang dikelola terlindungi dari penyalahgunaan. Oleh karena itu, peningkatan ketiga aspek ini akan berkontribusi secara signifikan terhadap akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Percut Sei Tuan.

Permasalahan yang terkait dengan pengelolaan dana desa di Kecamatan Percut Sei Tuan, seperti dugaan penyalahgunaan dana di beberapa desa mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Pengaruh Transparansi Digital, Partisipasi Masyarakat, dan Keamanan Data Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Percut Sei Tuan". Kami berharap bahwa pada akhir studi ini, para pembuat kebijakan dan anggota masyarakat di Kecamatan Percut Sei Tuan akan memiliki gagasan yang lebih baik tentang cara menangani dana desa, dan bahwa kita semua dapat bekerja sama untuk membuat proses ini lebih terbuka, partisipatif, dan aman.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka permasalahan berikut ini diidentifikasi dalam penelitian ini:

1. Meskipun terdapat peningkatan alokasi dana desa, sejumlah kasus penyalahgunaan dana desa di Kecamatan Percut Sei Tuan menunjukkan lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaannya.
2. Adanya kasus penyalahgunaan dana desa yang berulang di beberapa desa di Kecamatan Percut Sei Tuan menunjukkan perlunya sistem pengawasan yang lebih efektif dan mekanisme akuntabilitas yang kuat untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.
3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi penggunaan dana desa menyebabkan ketidakberhasilan dalam memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka penelitian ini hanya berfokus pada permasalahan sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya fokus pada pengelolaan dana desa di Kecamatan Percut Sei Tuan dan tidak mencakup daerah lain di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
2. Penelitian ini terbatas pada periode 2020 – 2024, dan tidak membahas isu atau data sebelum dan sesudah periode tersebut.
3. Penelitian ini hanya menganalisis pengaruh transparansi digital, partisipasi masyarakat, dan keamanan data terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, tanpa membahas faktor-faktor lain yang mungkin berpengaruh.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan keterbatasan masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh transparansi digital terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Percut Sei Tuan.
2. Bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Percut Sei Tuan.
3. Bagaimana pengaruh keamanan data terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Percut Sei Tuan.

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks dan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh transparansi digital terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan Percut Sei Tuan.
2. Mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Percut Sei Tuan.
3. Mengetahui pengaruh keamanan data terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Percut Sei Tuan.

### 1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat untuk Penulis

Menurut penulis, penelitian ini berpotensi untuk meningkatkan pemahaman tentang akuntansi di sektor pemerintahan, terutama dalam hal transparansi, partisipasi masyarakat, dan keamanan data. Penelitian ini juga bertujuan untuk membahas, mengembangkan, serta meningkatkan kewajiban dalam mengatur penggunaan dana desa di wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan.

2. Manfaat untuk Pemerintah Desa

Penelitian ini bertujuan memberikan manfaat bagi kepala desa agar dapat merumuskan kebijakan yang efektif dalam mengelola dana desa. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat Percut Sei Tuan melalui peningkatan level keterbukaan penggunaan teknologi digital, termasuk melibatkan partisipasi aktif masyarakat, serta menjamin keamanan informasi yang digunakan. Di samping itu, penelitian ini juga

dapat berfungsi sebagai instrumen penilaian bagi kepala desa, memberikan dasar untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desa, dan berperan penting dalam meningkatkan kemampuan staf desa.

3. Manfaat untuk Peneliti

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi mahasiswa lain dan menjadi sumber berharga untuk penelitian serupa di masa mendatang.

4. Manfaat untuk Masyarakat

Diharapkan penelitian ini akan membantu masyarakat memahami dan menangani masalah yang terkait dengan pengelolaan dana desa. Hasilnya dapat membantu masyarakat memahami lebih baik dan memberikan perspektif tentang transparansi digital, partisipasi masyarakat, dan keamanan data dalam pengelolaan dana desa.